



KR-Antara/Aditya Pradana Putra

MISS INDONESIA 2024: Miss Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Clarita Cahya Adity (kiri) bersama kontestan lain dalam 17 besar ajang Miss Indonesia 2024 di Jakarta, Rabu (29/5/2024). Pada ajang yang diikuti 38 kontestan dari seluruh daerah se-Indonesia ini, wakil DIY lolos ke babak lima besar bersama Anna Sakurai Dananjaya (Bali), Priyanka Puteri Ariffia (DKI Jakarta), Arindina Aulia Taim (Aceh), serta Monica Kezia Sembiring (Sumatera Utara) dan pemenangnya akan dikirim untuk mengikuti ajang Miss World ke-72.

KELEBIHAN PEMBAYARAN UKT

Rektor PTN dan PTNBH Harus Kembalikan

JAKARTA (KR) - Pemerintah (Kemdikbudristek) meminta Rektor PTN atau PTNBH segera mengembalikan uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa yang mengalami kelebihan membayar. Hal itu tertuang dalam surat edaran ke PTN dan PTNBH mengenai pembatalan kenaikan UKT .

Salah satu isinya adalah pengembalian kelebihan pembayaran UKT. Per tanggal 27 Mei 2024, Dirjen Diktiristek secara resmi mengirim surat No 0511/E/PR.07.04/2024 kepada Rektor PTN dan PTNBH untuk membatalkan dan mencabut rekomendasi dan persetujuan tarif UKT dan IPI tahun 2024 di 75 universitas negeri dan PTN yang berstatus Badan Hukum (PTNBH).

Hal itu disampaikan Dirjen Diktiristek Abdul Haris dalam siaran persnya, Rabu (29/5). "Kami berkomitmen menyelenggarakan kebijakan pendidikan tinggi yang berkeadilan dan inklusif serta memastikan

agar tidak ada anak Indonesia yang mengubur mimpinya berkuliah di PTN karena kendala finansial," ucap Haris,

Setidaknya ada enam poin penting dalam surat edaran Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek tersebut. Salah satunya adalah perihal calon mahasiswa baru yang sudah melakukan pembayaran UKT 2024.

Dalam Surat Dirjen poin keenam, Dirjen menginstruksikan mengenai kelebihan pembayaran UKT akibat revisi Keputusan Rektor, Rektor PTN dan PTNBH perlu segera melakukan pengembalian kelebihan pembayaran atau penyesuaian perhitungan

pembayaran UKT mahasiswa tersebut untuk semester berikutnya.

Selain itu, dalam suratnya Dirjen Haris juga ingin memastikan, tidak ada mahasiswa baru di universitas negeri yang membayar biaya kuliah lebih tinggi akibat dilakukannya revisi keputusan rektor.

Direktorat Jenderal Diktiristek akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar PTN dan PTNBH dapat menjalankannya dengan lancar. "Keputusan ini menunjukkan, kami mendengarkan aspirasi masyarakat dan selalu menindaklanjutinya secara serius," katanya.

Pihaknya, berkomitmen menyelenggarakan kebijakan pendidikan tinggi yang berkeadilan dan inklusif serta memastikan agar tidak ada anak Indonesia yang mengubur mimpinya berkuliah di perguruan tinggi negeri karena kendala finansial. **(Ati)-f**

NETRALITAS APARAT DI PILKADA 2024

Menko Polhukam Ingatkan TNI/Polri dan ASN

JAYAPURA (KR) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengingatkan netralitas TNI-Polri dan aparat sipil negara (ASN) di Pilkada 2024 harus diwujudkan. hal itu, dimaksudkan agar pilkada berlangsung aman.

"Dengan netralitas TNI-Polri dan ASN diharapkan pelaksanaan pilkada aman, apalagi sudah ada pengalaman saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang juga berlangsung aman," kata Hadi Tjahjanto dalam pengarahannya saat rakor persiapan pilkada di enam provinsi di Tanah Papua yang dipusatkan di Jayapura Papua, Rabu (29/5).

Diakui Menko Polhukam, selain netralitas, juga perlu ditingkatkan sinergisitas, optimalisasi peran dan fungsiforum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), sehingga pelaksanaan pilkada berlangsung aman. Sikap dan perilaku netral perlu ditunjukkan ASN, TNI dan Polri agar tidak terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pilkada yang dapat mempengaruhi

Febrie Adriansyah.

Pihak Kejaksaan telah menyerahkan anggota Densus Polri tersebut kepada Paminal Mabes Polri. Terkait siapa yang memerintahkan anggota Densus 88 Antiteror Polri itu untuk membututi Jampidsus, Ketut mengatakan hal itu menjadi kewenangan Polri. "Itu menjadi kewenangan teman-teman Mabes Polri yang lebih tahu. Silakan rekan-rekan menanyakan perkembangan lebih lanjut ke Mabes Polri," ujarnya.

Ketut juga menekankan bahwa jaksa sudah terbiasa dengan ancaman dan tekanan, sehingga tidak akan lemah dengan tekanan maupun ancaman apapun. "Dan kami tidak lemah dengan ancaman dan tekanan. Tetap penegakan hukum terus berjalan menjadi panglima di negeri ini," tandasnya.

Ditambahkan, saat ini Kejaksaan Agung tetap menjalankan tugas dan fungsinya mengusut perkara pidana maupun korupsi. "Pesannya Pak Jampidsus kami tetap on the track. Selain itu juga tidak ada peningkatan ataupun permintaan untuk pengamanan di Kejaksaan Agung pasca-penguntitan Jampidsus terjadi," pungkasnya. **(Ant/Has)-f**

DISAMAKAN DENGAN ASN

Usia Pensiun TNI-Polri Direvisi

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan, usia pensiun anggota TNI dan Polri direvisi dalam Undang Undang untuk menyamakan dengan aturan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, angka tingkat harapan hidup masyarakat di Indonesia pun saat ini meningkat. "Semuanya kan sudah 60 tahun (usia pensiun), tinggal Polri sama TNI saja yang belum," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/5).

Adapun DPR kini tengah menggulirkan Revisi Undang Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). RUU itu disetujui menjadi usul inisiatif DPR berdasarkan Rapat Paripurna pada Selasa (28/5).

Sejauh ini, Saleh mengatakan, pemba-

hasan RUU itu masih berada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Pada saatnya, nanti RUU Polri itu bakal dibahas juga di Komisi III DPR.

Ia pun mengatakan, belum ada hal terkait isu lain yang akan dibahas di dalam RUU Polri, selain soal masa pensiun. Namun ia tak menutup kemungkinan akan ada poin-poin lain yang akan dibahas ketika pembahasannya dimulai di Komisi III DPR, salah satunya terkait anggota Polri bisa masuk ke kementerian apapun. "Terserah kan kalau diajukan kita bahas, kalau semua fraksi menyetujui ya bisa masuk," katanya.

Dalam draf RUU tersebut, batas usia pensiun anggota Polri diatur dalam Pasal 30 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa anggota Polri pensiun pada usia 60 tahun, tetapi bisa 65 tahun bagi pejabat fungsional. **(Ant/San)-f**

PUTUSAN SELA GAZALBA SALEH

KPK Resmi Lakukan Perlawanan

JAKARTA (KR) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melawan putusan sela majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menerima nota keberatan (eksepsi) terdakwa mantan Hakim Agung Gazalba Saleh dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Tim jaksa KPK telah menandatangani akta permintaan perlawanan melalui Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Tim jaksa KPK, hari ini telah resmi menyatakan langkah hukum berupa perlawanan (Verzet) kaitan dengan putusan sela majelis hakim dalam perkara terdakwa Gazalba Saleh," kata Kepala Bagian Penerimaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (29/5).

Ali menerangkan, aArgumentasi hukum untuk upaya hukum ini segera akan disusun dan disiapkan tim jaksa dalam memorinya. Setelah itu dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta melalui PN Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Fahzal Hendri dalam sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/5), mengabulkan nota keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa Gazalba Saleh. Fahzal menjelaskan salah satu alasan majelis hakim mengabulkan nota keberatan Gazalba, yakni tidak terpenuhinya syarat-syarat

pendelegasian penuntutan dari Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi sesuai asas single prosecution system (sistem penuntutan tunggal).

Dengan demikian, majelis hakim berpendapat Direktur Penuntutan KPK tidak memiliki kewenangan sebagai penuntut umum dan tidak berwenang melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU dalam kasus Gazalba Saleh, sehingga penuntutan dan surat dakwaan penuntut umum KPK tidak dapat diterima.

Untuk itu, majelis hakim memerintahkan Gazalba Saleh segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan sela diucapkan serta membebankan biaya perkara kepada negara. **(Ant/Has)-f**

POLRI PALING BANYAK DIADUKAN

Komnas HAM Terima 955 Aduan

JAKARTA (KR) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiرو mengungkapkan, pihaknya menerima 955 aduan sepanjang Januari hingga Mei 2024.

"Periode Januari hingga Mei 2024, Komnas HAM menerima sejumlah 955 kasus yang kemudian diadukan," kata Atnike saat Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5).

Dari jumlah tersebut, kata Atnike, sebanyak 366 kasus ditangani melalui mekanisme pemantauan, sebanyak 98 kasus melalui mekanisme mediasi, serta 491 kasus melalui mekanisme saran dan tanggapan.

Atnike mengungkapkan bahwa Polri menjadi pihak teradu yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM, yakni sebanyak 278 aduan. "Yang kedua terbanyak adalah korporasi sejumlah 146 aduan, dan yang ketiga adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejumlah 91 aduan," ucapnya.

Adapun berdasarkan jenis hak yang dilanggar atau diadukan, yang tertinggi adalah hak atas kesejahteraan, disusul hak atas memperoleh

keadilan, lalu hak atas rasa aman. Sementara itu, berdasarkan aspek wilayahnya, Jakarta menempati urutan wilayah aduan tertinggi, yakni sebanyak 131 kasus, disusul Jawa Barat 90 kasus, dan Sumatera Utara 108 kasus.

Agenda Rapat Kerja Komnas HAM bersama Komisi III itu membahas terkait dengan program kerja prioritas, target 2024, dan sinergitas Komnas HAM dengan institusi atau aparat penegak hukum lain di Indonesia.

Selain itu, evaluasi kinerja dan penanganan kasus terkait pelanggaran HAM berat masa lalu, penanganan kasus dan kendala yang dihadapi, serta rencana Komnas HAM untuk menyusun penilaian tindaklanjut atas rekomendasi Komnas HAM.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh tersebut juga dihadiri Komisioner Mediasi Prabianto Mukti Wibowo, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Uli Parulian Sihombing, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah, dan Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyana. **(Ant/San)-d**

PELAKU BAYAR GANTI RUGI RP 799 JUTA

Korban TPPO Jual Ginjal Terima Restitusi

BEKASI (KR) - Sebanyak 24 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TP-PO) modus jual organ ginjal jaringan internasional menerima uang ganti rugi atau restitusi senilai Rp 799.542.000. Pemberian ganti rugi tersebut berdasarkan hasil putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Dwi Astuti Beniarty mengatakan, uang restitusi tersebut dibebankan kepada pelaku atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban atau ahli waris berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang pada 5 April 2024. "Jadi masing-masing korban menerima uang restitusi senilai Rp 33.314.250," katanya di Cikarang, Rabu (29/5).

Menurutnya, penyerahan uang restitusi ini merupakan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Sehingga membantu proses pemulihan korban dari penderitaan akibat dari TPPO.

Kasus TPPO tersebut ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Cikarang melalui perkara nomor 501/Pid.Sus/2023/Pn.Ckr dengan terdakwa Hanim alias Teguh dan kawan-kawan. Perkara TPPO ini berupa perdagangan organ tubuh ginjal oleh 15 orang terdakwa. Seluruh korban dikumpulkan

di rumah penampungan yang berlokasi di wilayah Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi sebelum menjalani operasi pengangkatan hingga penjualan ginjal di Kamboja. "Penyerahan restitusi di Kejari Kabupaten Bekasi ini adalah yang kedua kalinya. Sebelumnya dua orang korban perkara TPPO juga menerima restitusi pada 17 Mei 2022 di Kejaksaan Agung," ucapnya.

Kajati Jawa Barat Ade Tajudin Sutiawarman menyatakan perkara TP-

PO merupakan bentuk perbudakan manusia di era modern yang menjadi salah satu perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. "Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lain telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa," katanya. **(Ant/Has)-f**



KR-Antara/Pradita Kurniawan Syah

Penyerahan simbolis uang restitusi kepada perwakilan korban tindak pidana perdagangan orang modus jual ginjal jaringan internasional di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Rabu (29/5/2024).